

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang sejak awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua negara ini pula telah menjalin kerjasama sejak tahun 1950-an, salah satunya pada bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan Indonesia-AS terus mengalami perkembangan dan banyak peralatan militer seperti pesawat tempur maupun pesawat angkut yang diperoleh Indonesia dari AS. Akan tetapi, hubungan kedua negara menjadi dingin pada tahun 1990an.

Kerjasama antara Indonesia dan AS mulai dibatasi setelah terjadi pembunuhan masal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada tahun 1991. Delapan tahun kemudian, AS menjatuhkan embargo terhadap Indonesia atas respon dari intervensi militer yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999 untuk mencegah pemisahan diri Timor Timur yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil dan merusak 70 persen infrastrukturnya (Morrissey, 2006). Embargo yang dilakukan oleh AS merupakan bentuk pelarangan lalu lintas barang, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor, terutama dalam hal pengadaan senjata terhadap suatu negara yang dinilai melakukan pelanggaran (Marwan, 2009, hal. 192). Dikarenakan banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk-produk AS, mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kemampuan militer Indonesia.

Embargo ini berdampak pada kerjasama pertahanan dan segala bentuk bantuan, termasuk segala macam bantuan peralatan alutsista. Salah satu alutsista yang terkena dampak yaitu pesawat tempur F-16 yang tidak mampu mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan sehingga tidak dapat menjaga kepulauan Indonesia dan terancam menjadi besi tua (UPI, 1996). Selain itu, kerjasama pertahanan di bidang pelatihan dan pendidikan militer juga dihentikan, sehingga Indonesia tidak dapat lagi mengirimkan perwira-perwiranya untuk belajar di AS.

Pada tahun 2003, untuk pertama kalinya sejak tahun 1994, presiden Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia. Dalam pertemuan itu, George

W. Bush mengapresiasi upaya reformasi militer Indonesia dalam rangka transisi menuju negara demokrasi yang matang dan stabil, serta menghargai upaya Indonesia dalam rangka melawan terorisme. Sebagaimana diketahui, sejak kejadian 9/11 yang menimpa AS, Bush gencar mengajak semua bangsa untuk bersatu melawan terorisme yang dikenal pula dengan slogan "*The Global War on Terrorism*". Karena kedua negara memiliki persamaan persepsi mengenai ancaman terorisme, sehingga dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam perang melawan terorisme, termasuk melalui pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan pertukaran informasi. Dalam hal ini, Megawati, presiden Indonesia menyambut upaya AS dalam mengembangkan hubungan sipil-militer yang selayaknya dalam *International Military Education Training* (IMET) dan *Regional Defense Counter Terrorisme Fellowship* (Kemlu, 2003).

Hal ini merupakan pertanda baik mengenai kerjasama pertahanan antar kedua negara yang mulai terbina kembali. Kemajuan kerjasama pertahanan kedua negara ditunjukkan pula saat juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Sean McCormack, resmi mengumumkan pencabutan embargo terhadap Indonesia pada November 2005. Akan tetapi, embargo belum dicabut sepenuhnya, dimana pelepasan sanksi ini hanya kepada penjualan perlengkapan militer yang bersifat tidak mematikan (*non-lethal military equipment*), sebagaimana yang dinyatakan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Richard Boucher. Selanjutnya, Boucher menegaskan bahwa pencabutan embargo sepenuhnya bergantung pada kerjasama penanganan terorisme, penanganan hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM, dan juga akuntabilitas dan transparansi keuangan militer Indonesia (Shoelhi, 2009, hal. 241-242).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun embargo sudah dicabut, AS masih belum sepenuhnya percaya terhadap Indonesia. Hal serupa terjadi pada Indonesia, Indonesia belum dapat sepenuhnya percaya pada AS. Pada 7 November 2005, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia yang menjabat pada

saat itu, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Rusia ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung kepada AS, karena ketergantungan Indonesia terhadap AS pada masa lalu, telah memberikan pelajaran yang sangat berarti. Lebih jauh lagi, pertemuan Presiden SBY dan Presiden Putin tersebut dilakukan dua hari sebelum pencabutan embargo diberlakukan oleh Presiden Bush. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, karena pertemuan Presiden SBY dengan Presiden Putin merupakan salah satu cara diplomasi Indonesia dimana SBY membuat AS khawatir akan hubungan Indonesia-Rusia yang semakin erat dan akan mengurangi pengaruh Amerika di Indonesia dan Asia Tenggara (Shoelhi, 2009, hal. 245).

Pada tahun 2006, Presiden Bush melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan Bush ini menunjukkan posisi Indonesia penting di dunia internasional (Deutsche Welle, 2006). Membaiknya kerjasama pertahanan kedua negara ini juga terlihat dari dilangsungkannya kembali pelatihan militer oleh AS. Latihan bersama yang dikenal dengan "*Garuda Shield Program*" ini berlangsung sejak tahun 2006. Kemudian, pelatihan militer IMET (Indonesia Military Education Training) bagi para perwira Indonesia untuk mendapatkan pendidikan militer di AS juga kembali dibuka (Winarso, 2013).

Kemajuan hubungan ini pula ditandai dengan kabar bahwa F-16 sudah sembuh dari "sakit" dan telah ikut berpartisipasi dalam latihan USINDO (the United States – Indonesia Society). Selanjutnya, pada East Asian Summit 2011, AS menawarkan 24 F-16 bekas USAF yang kemudian disetujui oleh pemerintah Indonesia (Altileri, 2012). Perkembangan signifikan juga ditandai dengan pembelian helikopter tempur Apache 64E Guardian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh menteri AS, Chuck Hagel, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro pada tahun 2013 lalu. Ia

mengatakan bahwa untuk pertama kalinya AS setuju menjual Helikopter Serang baru AH 64E Guardian kepada Indonesia dan menyediakan helikopter kelas dunia ini merupakan bentuk kepercayaan AS untuk membangun kemampuan militer Indonesia (Saragih, 2013).

Dalam melakukan kerjasama internasional seharusnya selalu mempertimbangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara yaitu dengan AS agar kepentingan nasional Indonesia tetap tercapai. Karena belajar dari sejarah, tentunya Indonesia tidak ingin pengalaman buruk itu terulang kembali. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan perlu terus dilakukan.

Perkembangan demokrasi dan profesionalisme TNI yang ditunjukkan oleh Indonesia, pada tahun 2010, program pelatihan satuan elite militer Indonesia, kopassus, yang sempat terhenti pada tahun 1998 kembali dibuka (Farid, 2010). Akan tetapi masih terdapat pro dan kontra di dalam pemerintahan AS. Kongres AS masih berkeberatan akan terbukanya kembali pelatihan ini, yang kemudian lahirlah *Leahy Law*. Hukum ini melarang negara melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM, kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut dan diproses secara hukum. Pada era pemerintahan Obama, mereka menyasiasi larangan ini salah satunya dengan melatih prajurit-prajurit muda Indonesia yang tidak memiliki sejarah pelanggaran HAM.

Terlihat pada tahun ini, Indonesia masih belum mendapatkan kepercayaan AS sepenuhnya. *Human rights vetting* ini masih berlangsung hingga saat ini. setiap personel militer Indonesia yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat, baik untuk menjalani pendidikan, latihan militer, kursus dan lain sebagainya harus menjalani proses *vetting*. Dalam proses itu, riwayat hidup setiap individu personel militer diteliti secara khusus oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kejadian penangguhan izin kunjungan AS ini belum lama pun sempat terjadi kepada panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang dilarang memasuki wilayah Washington DC, AS (Rizky, 2017). Hal demikian tentu saja memunculkan kondisi ketidaknyamanan

bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip kerjasama pertahanan adalah kesetaraan dalam mencapai kepentingan bersama dan saling menguntungkan (Wibisono, 2017).

Berbagai kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia – AS baik di bidang pendidikan maupun di bidang pelatihan militer pun belum memiliki kemajuan yang sangat berarti. Beberapa latihan yang diselenggarakan masih pada level taktis dan teknis, belum pada level strategis. Strategi militer berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran dan penggunaan seluruh kekuatan dan kemampuan militer untuk mendukung strategi pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional. Pembinaan dan penggunaan militer diarahkan pada keterpaduan tiga angkatan (Darat, Laut, dan Udara) tanpa meninggalkan ciri khas angkatan, baik dalam operasi gabungan maupun operasi angkatan masing-masing.

Jika dibandingkan, strategi lebih besar dalam perspektif daripada taktik militer yang merupakan disposisi dan manuver dari unit tertentu atau medan pertempuran laut. Hal tersebut dapat dilihat dari materi kegiatan yang diimplementasikan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut, seperti latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)*. Materi kegiatan yang dilakukan seperti latihan menembak senapan, menembak mortir 60 mm, GPMG, sniper, jungle survival, patroli, dan juga raid (Mingkid, 2017). Selain itu, dapat dilihat pula pada latihan bersama Garuda Shield yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara anggota CPX (*command Post Exercise*) kedua Negara. Latihan bersama Garuda Shield meliputi taktik-taktik perang serta penggunaan alutsista buatan Amerika Serikat, melatih kecakapan tentara Indonesia untuk berperang, dan juga mengajarkan cara-cara penanggulangan bencana. Dapat dilihat bahwa pada pelatihan tersebut belum mencapai level strategis dimana melibatkan batalyon dan bergabungnya 3 matra TNI.

Di lain sisi, isu-isu yang terjadi baik di dalam maupun diluar bidang pertahanan yang berkaitan antara kedua negara perlu diperhatikan. Begitu pula dengan isu internal negara masing-masing yang dapat mempengaruhi perspektif Indonesia ke AS, maupun AS ke Indonesia juga perlu diberi perhatian. Hubungan kerjasama kedua negara tidak akan rusak dalam waktu dekat, citra AS di mata Indonesia merupakan perkembangan yang luar biasa di era Obama dalam hubungan AS dengan negara Muslim. Akan tetapi, pada era pemerintahan Donald Trump menunjukkan ketidakpastian atas kebijakan yang ia buat. Salah satu kebijakan yang ia jalankan pasca pelantikkannya sebagai presiden AS yaitu kebijakannya mengenai islamophobic rhetoric, yaitu dengan diberlakukannya larangan bagi beberapa negara Muslim untuk datang ke AS. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terkena larangan tersebut, beberapa warga Indonesia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi di AS atau sekedar berkunjung ke negeri tersebut.

Meskipun konsekuensi lonjakan sentimen anti-Amerika di Indonesia sulit diprediksi, risiko tersebut perlu mendapat perhatian khusus, karena banyak hal tak terduga dari kepresidenan AS seperti retorika proteksi Trump dan inklusinya terhadap Indonesia yang masuk ke dalam daftar kontributor defisit perdagangan global AS (Harding dan Sutton, 2017, 1-4). Selain isu yang terjadi di antara kedua negara, isu dalam negeri juga memberikan pengaruh terhadap hubungan Indonesia – AS, seperti peristiwa pemilu Gubernur Jakarta yang dilaksanakan awal tahun lalu yang menimbulkan berbagai interpretasi negara-negara di dunia, termasuk AS, bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu ini dipandang sebagai ujian toleransi agama, etnik, dan juga politik di dalam negeri dan juga reputasi Indonesia sebagai negara Muslim paling toleran di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (Parameswaran, 2017). Kemudian, hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran negara di dunia bahwa kelompok Islam garis keras akan terus berusaha menggunakan agama sebagai senjata politik. Hal ini pula ditakutkan akan

mendorong kebangkitan Al-Qaeda, yang telah dihapuskan oleh pemerintah Indonesia secara efektif. (The Editorial Board, 2017).

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia-AS perlu ditingkatkan karena melihat dalam kerjasama pertahanan yang terjalin antara kedua negara ini masih ada ketidaksetaraan antara Indonesia dengan AS dimana AS masih memberlakukan *human rights vetting* terhadap militer Indonesia. Dan juga melihat dari hubungan kedua negara dimana masih terdapat isu-isu politik yang terjadi yang dapat mempengaruhi *Confidence Building Measures* (CBM) atau rasa saling percaya kedua negara demokrasi ini. Kemudian, melihat kegiatan kerjasama itu sendiri dinilai kurang menunjukkan kedekatan hubungan dari kedua negara tersebut dan juga dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara (*capacity building*). Sehingga, dibutuhkan upaya diplomasi pertahanan dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS. Penelitian dibatasi pada periode 2012-2017 karena lima tahun merupakan waktu yang cukup untuk melihat upaya-upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS.

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia yang fokus pada dua karakteristik yang diungkapkan oleh Multazam (2010), yaitu *defense diplomacy for confidence building measure*, dan *defense diplomacy for capacity building*. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tesis dengan judul: **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia – Amerika Serikat (2012-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama pertahanan Indonesia-AS telah terjalin sejak beberapa dekade, akan tetapi kerjasama pertahanan kedua negara ini masih dinilai kurang dengan ditunjukkannya ketidaksetaraan terhadap kedua negara yang terlibat. Ditambah lagi dengan isu-isu yang terjadi dalam negeri

masing-masing maupun isu yang melibatkan kedua negara yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kerjasama pertahanan Indonesia – AS. Begitu pula melihat bentuk latihan maupun pendidikan militer yang diselenggarakan oleh kedua negara masih pada level taktis dan teknis. Oleh karena itu dibutuhkan upaya diplomasi pertahanan dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dan AS.

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS, dan fokus pada dua karakteristik, yaitu diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan *confidence building measure*, dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan *capacity building*. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – AS tahun 2012-2017?

Terkait dengan rumusan masalah di atas maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan *confidence building measures* (CBM) untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – Amerika Serikat?
2. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan *capacity building* untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – Amerika Serikat?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia pada tatanan *confidence building measures (CBMs)* dalam kerjasama pertahanan Indonesia AS periode 2012-2017.

2. Menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia pada tatanan *capacity building* dalam kerjasama pertahanan Indonesia – Amerika Serikat periode 2012-2017.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian dengan judul Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – Amerika Serikat penting untuk dilakukan karena penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu lebih banyak berfokus pada hubungan kedua negara pada saat embargo dan dampak yang diterima oleh Indonesia serta menganalisa tindakan embargo sendiri dari perspektif hukum, akan tetapi belum ada penelitian yang menyentuh analisa diplomasi pertahanan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam rangka menjaga stabilitas kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh keduanya.

Hasil dari penelitian ini, dapat menjadi sumber pertimbangan dan kajian bagi para pembaca mengenai upaya-upaya diplomasi pertahanan yang telah dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – AS agar dapat dikaji kekurangan serta kelebihanannya. Selanjutnya, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – AS.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang diplomasi pertahanan khususnya mengenai upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama

pertahanan Indonesia – AS periode 2012-2017. Sehingga kedepannya dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan akademis bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah (Kementrian Pertahanan, Kementrian Luar Negeri) dalam melakukan diplomasi pertahanan guna meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara lain.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam tatanan *confidence building measures* dan *capacity building*. Serta pengaruhnya terhadap peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia – AS periode 2012-2017.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan diplomasi ini dan data sekunder berasal dari studi pustaka. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan teknik analisis yang dikemukakan Cresswell serta menggunakan triangulasi data untuk mengukur keterandalan data.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini terdiri atas gambaran umum tentang pemilihan topik penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal terkait pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam akhir penulisan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, bab ini berisikan tiga subbab yang terdiri dari kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka meliputi tinjauan umum sesuai konteks yang berupa konsep-konsep dan dasar–dasar teori yang relevan serta mendukung analisis permasalahan penelitian. Sedangkan penelitian terdahulu akan menyuguhkan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan variable dengan penelitian ini yang kemudian akan digunakan sebagai panduan penulisan serta dapat ditemukan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diambil oleh peneliti. Mengenai kerangka pemikiran akan menjadi rangkaian penalaran yang akan membantu peneliti untuk mempermudah analisa penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Bab 3 Metode Penelitian, bab ini menguraikan dan menggambarkan tentang metode pelaksanaan penelitian secara terperinci. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang diantaranya desain penelitian, sumber data/subjek dan objek penelitian, penjelasan mengenai pendekatan, serta teknik dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, definisi operasional dan rencana jadwal kegiatan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif; sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, subjek penelitian terdiri atas kementerian

pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta para pakar di bidang diplomasi pertahanan dan kerjasama pertahanan. Objek penelitian ini adalah upaya-upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan hubungan Indonesia – AS terkait kerjasama pertahanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian pustaka. Sedangkan teknik analisisnya melalui deskriptif kualitatif.

Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum mencakup gambaran objek penelitian mengenai upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan hubungan Indonesia – AS terkait kerjasama pertahanan. Kemudian hasil penelitian berisi temuan-temuan yang diperoleh selama diadakannya penelitian melalui proses wawancara maupun kajian pustaka. Kemudian data-data yang diperoleh akan melalui proses analisis data dengan membandingkan fenomena temuan dengan teori yang relevan.

Bab 5 Simpulan dan Saran. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi kebijakan. Kesimpulan berisikan rangkuman dan jawaban dari masing-masing pertanyaan penelitian. Sedangkan saran berisikan saran penulis atas objek penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dan manfaat penelitian.